BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan kesejateraan masyarakat selaras dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi:

- Transparansi : setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan harus memiliki mekanisme yang jelas dan terukur serta dapat leluasa diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- Akuntabilitas: penyelenggaraan fungsi – fungsi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terukur kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan berdaya guna dan berhasil guna;
- Partisipasi: setiap proses penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan melibatkan masyarakat/para pemangku kepentingan sebagai pelaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan yang efisien dan efektif, diperlukan adanya dokumen perencanaan yang penyusunannya merepresentasikan tiga pilar utama tersebut. Dalam artian, penyusunan dokumen

perencanaan melibatkan seluruh atau representasi para pemangku kepentingan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama, dan dokumen perencanaan menggambarkan kinerja terukur yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan. Ditinjau dari jangka waktunya, dokumen perencanaan terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek/tahunan.

Kewajiban bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Perda Nomor 10 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 . Dalam keempat peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsí SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4286);
2) Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 5, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4355);
3) Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4421);

4) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran NegaranRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4578);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik *Indonesia Nomor 4826);

11) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

15) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031

16) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030;

17) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;

18) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
20) Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud penyusunan Renstra

Maksud disusunnya Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 adalah menjabarkan seluruh keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kediri selaras dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. Rencana strategis berisi rumusan langkah-langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin dihadapi/terjadi.

b) Tujuan penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan sesuai amanat RPJMD yang berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, yaitu :

1) Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2016-2021;
2) Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan periode tahun 2016-2021;
3) Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun kedepan;
4) Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perikanan baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEDIRI
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kediri
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Kediri
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Jawa Timur
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kediri
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perikanan.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, dua Kepala Bidang, dan kelompok Pejabat Fungsional seperti dapat dilihat pada Bagan 1.

Struktur organisasi tersebut telah sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kediri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

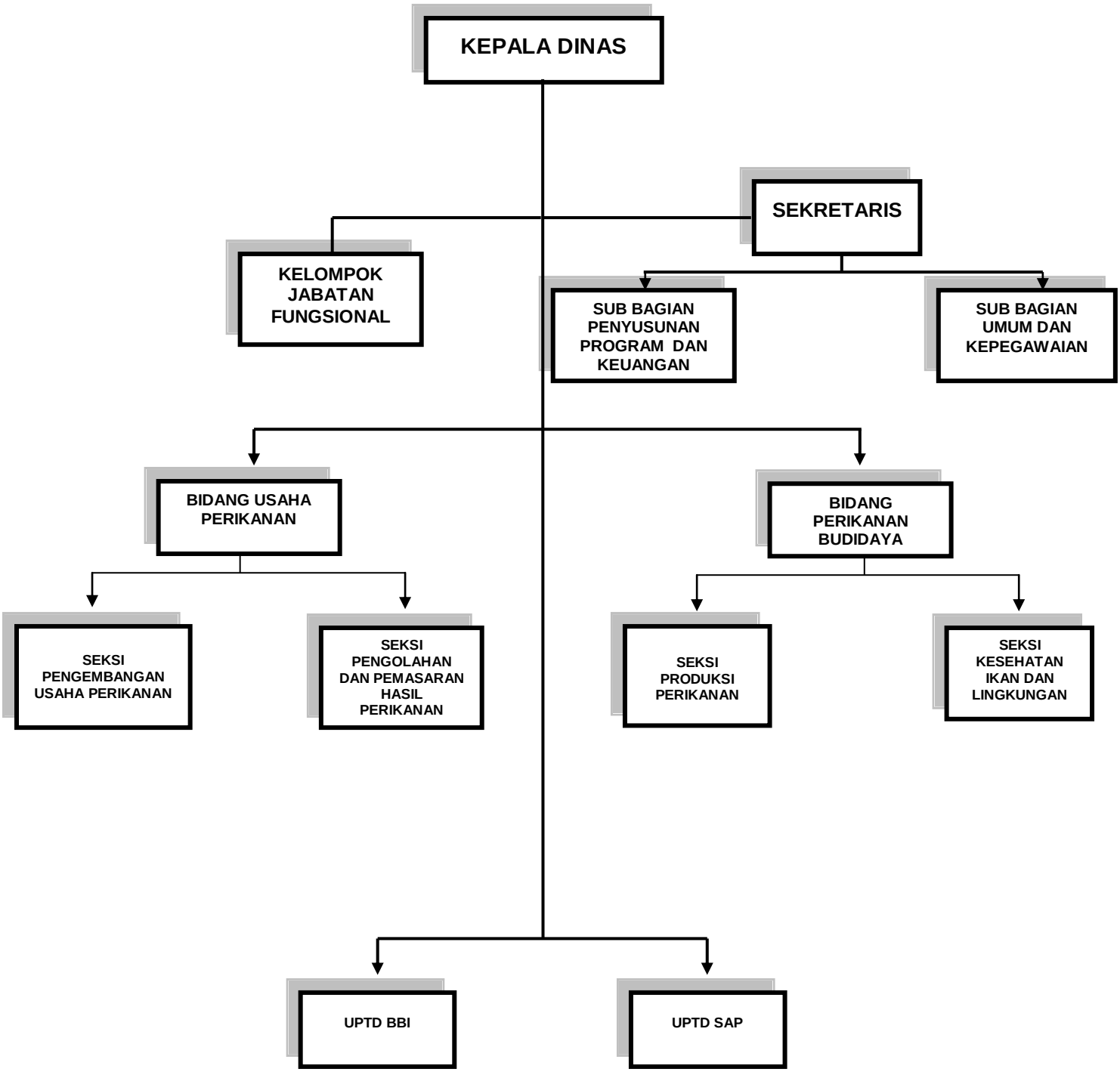

Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kediri

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016. Dinas Perikanan Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perikanan;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perikanan;
3) Pengkoordinasian perencanaan, dan pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang perikanan dengan sektor terkait;
4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
5) Pembinaan UPTD dalam lingkup Dinas Perikanan
6) Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati

Adapun uraian tugas dan fungsi dari setiap pejabat struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan;
   b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perikanan;
   c. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi dibidang perikanan dengan sektor terkait,
   d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
   e. pembinaan UPTD dalam lingkup Dinas Perikanan
   f. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati

JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI
SEKRETARIS	Membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan sarana prasarana	a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas; b. Penyusunan program dan pelaporan, pengelolaansistem data statistic daninformasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas; c. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana; d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang e. Penyusunan profil dinas; f. Pengooordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan perikanan; g. Perencanaan urusan rumah tangga, suarat-menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi. h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan teknis dinas; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala SUB BAGIAN Penyusunan Program dan Keuangan	Melakukan penyusunan program/ perencanaan dan pelaporan, pengelolaan sistem data statistic dan informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Dinas serta melaksanakan administrasi keuangan	a. Penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan dan pelaporan dinas; b. Penyiapan Penyusunan perencanaan program; c. Penyiapan bahan penyusunan data statistic dan profil dinas; d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang; e. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perikanan. f. Penyiapan bahan laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah g. Penyiapan bahan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dinas;

		h. Penyiapan bahan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belanja langsung dan belanja tidak langsung; i. Penyiapan bahan penyusunan pembayaran gaji pegawai dan tunjangan lainnya; j. Penyiapan bahan penyusunan Laporan keuangan dan capaian kinerja keuangan k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala SUB BAGIAN *Umum dan Kepegawaian*	Melakukan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan dan sarana prasarana administrasi kepegawaian	a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan urusan rumah tangga , surat menyurat, kerasipan, dokementasi, perpustakaan, kehumasan dan sarana prasarana; b. Pengelolaan administrasi perkantoran rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan, sarana dan prasdarana; c. Penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian barang di lingkungan dinas; d. Pengelolaan pengamanan dan perawatan barang/peralatan inventaris gedung; e. Pengelolaan pengawasan dan pengendalian inventaris barang/ peralatan serta pemeriksaan barang secara berkala; f. Penyiapan bahan pelaksanaan keprotokolan dan pengurusan administrasi perjalanan dinas; g. Penyiapan bahan pelaporan inventarisasi barang dan gedung; h. Penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai; i. Penyiapan bahan penilaian angka kredit pejabat fungsional; j. Penyiapan bahan pembinaan administrasi pegawai;

		k. Penyiapan bahan analisa jabatan dan beban kerja ; l. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kegiatan kepegawaian; m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
Kepala Bidang Perikanan Budidaya	melaksanakan urusan dalam bidang perikanan budidaya	a. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pembinaan teknis di bidang perikanan budidaya dan kesehatan lingkungan; b. pelaksanaan bimbingan manajemen dibidang produksi perikanan dan kesehatan lingkungan; c. pelaksanaan pembinaan standarisasi pengelolaan induk ikan, benih ikan dan kesehatan ikan d. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan teknis pelestarian dan perlindungan perikanan, e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan penanggulangan hama/penyakit, f. pelaksanaan sistem informasi perikanan (peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan budidaya); g. pelaksanaan koordinasi perlindungan dan pelestarian sumber hayati perairan; h. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana teknis perikanan budidaya;

		i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Perikanan budidaya; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Seksi Produksi Perikanan	melakukan urusan produksi perikanan.	a. penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi budidaya dan pembenihan; b. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis Cara budidaya Ikandanpembenihan yang baik (CBIB/CPIB) ; c. penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan, penggunaan dan pengawasan peredaran ikan/benih, serta pakan ikan; d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pembenihan dan pembudidaya ikan; e. penyiapan bahan pelaksanaan pengewasan mutu benih dan induk ikan; f. penyiapan bahan pelaksanaan hasil kaji terap dan inovasi teknologi budidaya dan pembenihan perikanan, g. penyiapan bahan pembinaan penggunaan pupuk dan pakan ikan serta alternatif pembuatan pakan alami dan pakan buatan, h. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

		produksi perikanan; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	melakukan urusan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.	a. penyiapan bahan perencanaan dan pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan; b. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kesehatan ikan dan sitem pengendalian hama dan penyakit ikan; c. penyiapan bahan pengawasan mutu kesehatan benih dan induk ikan; d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan; e. penyiapan bahan pengawasan peredaran ikan hidup dalam wilayah kabupaten, masuk wilayah kabupaten maupun keluar wilayah kabupaten; f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan pihak berwenang dalam penetapan status wilayah berkenaan berjangkitnya wabah penyakit ikan;

		g. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumberhayati perairan serta perlindungan dan pencegahan pencemaran sumberhayati perikanan; h. Penyiapan bahan pelaksanaan restoking ikan di perairan umum i. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegaiatan kesehatan ikan dan lingkungan; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Bidang Usaha Perikanan	melaksanakan urusan dalam bidang Usaha perikanan.	a. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan pembinaan usaha perikanan; b. pelaksanaan bimbingan manajemen dibidang usaha, kelembagaan, pengolahan dan pemasaran perikanan; c. pelaksanaan koodinasi, pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan usaha dan kemitraan usaha; d. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang perikanan; e. pelaksanaan sistem informasi teknologi pengolahan produk perikanan;

		f. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pengolahan produk perikanan; g. pelaksanaan rekomendasi ijin usaha perikanan yang berada lintas daerah Kabupaten; h. pelaksanaan penerbitan tanda pencatatan usaha budidaya ikan/ Ijin Usaha Perikanan yang berada di Kabupaten i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Usaha Perikanan; j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan	melakukan urusan Kelembagaan perikanan;	a. penyiapan bahan perencanaan dan pengelolaan kelembagaan perikanan; b. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan kerja sama kemitraan pelaku usaha perikanan; c. penyiapan bahan bimbingan sumberdaya dan kelembagaan perikanan; d. penyiapan bahan peningkatan kapasitas kelembagaan (kelompok) dan sumber daya manusia di bidang perikanan; e. penyiapan bahan penerbitan pendaftaran kelembagaan perikanan f. penyiapan bahan rekomendasi

		ijin usaha perikanan yang berada di lintas daerah Kabupaten; g. Penyiapan bahan penerbitan pencatatan/ijin usaha perikanan yang berada di wilayah Kabupaten h. penyiapan bahan pengembangan investasi dan permodalan usaha perikanan; i. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegaiatan Kelembagaan perikanan; j. pelaksanaan tugas lain yang diberiakn oleh Kepala Bidang Usaha Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	melakukan urusanPengolahan dan pemasaran produk perikanan;	a. penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan; b. penyiapan bahan bimbingan pengolahan dan pemasaran produk perikanan; c. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian mutu produk olahan ikan; d. penyiapan bahan penyebaran hasil inovasi dan perekayasaan teknologi pengolahan hasil perikanan; e. penyiapan bahan bimbingan sanitasi dan hygiene pengolahan produk perikanan; f. penyiapan bahan identifikasi dan pengembangan produk unggulan

		perikanan daerah; g. penyiapan bahan promosi dan informasi peluang pasar produk perikanan h. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegaiatan pengolahan dan pemasaran produk perikanan; i. pelaksanaan tugas lain yang diberiakn oleh Kepala Usaha Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kepala UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI)	a. Membantu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan BBI (Balai Benih Ikan); b. UPTD BBI berkedudukan di BBI Pare dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.	a. Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan terhadap unit Perbenihan Rakyat (UPR); b. Pelaksanaan inventarisasi, perbanyakan induk dan benih ikan; c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegaiatan perbenihan ikan; d. Pelaksanaan pemasaran produk BBI; e. Pelaksanaan koordinasi dan pelaporan kepada bidang-bidang terkait pada Dinas Peternakan dan Perikanan; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI)	melakukan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan UPTD BALAI	a. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan; b. Pelaksanaan pengelolaan asset-asset UPTD;

	BENIH IKAN (BBI).	c. Pelaksanaan pembinaan pegawai dilingkupnya; d. Pelaksanaan administrasi keuangan dilingkupnya;
Kepala UPTD SENTRA AQUABIS PERIKANAN (SAP)	a. Membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan SAP (Sentra Aquabis Perikanan); b. UPTD SAP berkedudukan di Pare dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.	a. Pelaksanaan penyebaran informasi pemasaran komoditas perikanan yang meliputi ikan konsumsi, benih ikan, ikan hias dan produk ikan olahan; b. Pelaksanaan pelayanan pemantauan benih ikan yang bermutu sesuai standar nasional; c. Pelaksanaan pelayanan pemantauan distribusi benih ikan dari dan keluar Kabupaten; d. Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan komoditas ikan segar dan olahan yang memenuhi standar mutu, serta peralatan untuk budidaya ikan.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD SENTRA AQUABIS PERIKANAN (SAP)	melakukan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan UPTD SENTRA AQUABIS PERIKANAN (SAP).	a. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan; b. Pelaksanaan pengelolaan asset-asset UPTD; c. Pelaksanaan pembinaan pegawai dilingkupnya; d. Pelaksanaan administrasi keuangan dilingkupnya;

Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Kediri

2.2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah seluruh personel Dinas Perikanan Kabupaten Kediri sebanyak 15 orang belum termasuk pegawai honorer dengan rincian seperti dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.1

Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

(orang)

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	**Pegawai Negeri Sipil**			**15**
-	Jabatan Fungsional Umum	8	2	
-	Jabatan Fungsional Tertentu			
2	**Honorer**			
-	Tenaga Operasional Kantor			
-	Tenaga Kebersihan			
-	Tenaga Keamanan Kantor			
-	THL-TBPP	2	3	
	Jumlah			

Tabel 2.2

Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

(orang)

No	Kepangkatan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsi-onal	Staff	
1	Golongan IV		1				
2	Golongan III			4		7	
3	Golongan II					3	
4	Golongan I						
5	Honorer						
	Jumlah						

Tabel 2.3

Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan

(orang)

No	Tingkat Pendidikan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsi-onal	Staff	
1	S-2		1				
2	S-1/DIV			4		3	
3	Sarjana Muda/DIII					4	
4	DI/DII						
5	SLTA					3	
6	SLTP						
7	SD						
	Jumlah						

Dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi serta analisis jabatan dan beban kerja, prosentase ketersediaan pegawai dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai

No	Jenjang Pendidikan	Kebutuhan (orang)	Tersedia	
			orang	%
1	S-2/S-1/DIV	16	8	
2	Sarjana Muda/DIII	4	4	
3	SLTA	3	3	
	Jumlah	**23**	**15**	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri memiliki sejumlah sarana dan prasarana, seperti dapat dilihat pada tabel berikut (belum dilakukan pemisahan aset).

Tabel 2.5

Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana & Prasarana

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
1	Tanah	Bidang	16	B	-	-
2	Alat Berat (generator, disel dll)	unit	13	4	9	-
3	Alat Angkutan (sepeda motor,mobil)	unit	48	14	30	4
4	Alat Pertanian, Peternakan dan Perikanan	buah	254	224	30	6
5	Alat Rumah Tangga Perkantoran	buah	1155	1085	70	-
6	Komputer	unit	17	11	6	-
7	LCD	unit	3	3	-	-
8	Laptop	unit	4	2	2	-
9	Alat Komunikasi / Studio	unit	10	8	2	-
10	Alat Kedokteran	buah	54	48	6	-
11	Alat Laboratorium	buah	275	223	52	-
12	Bangunan Gedung	unit	67	65	2	-
13	Jalan Irigasi dan Jaringan	Bidang	20	20	-	-

Keterangan : B=Baik; RR = Rusak Ringan; RB = Rusak Berat

Jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia masih ada yang belum mendukung kinerja organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ketersediaan sarana & prasarana dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6

Ketersediaan Sarana & Prasarana

No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah
1	Tanah		
2	Alat Berat (generator, disel dll)		
3	Alat Angkutan (sepeda motor,mobil)		
4	Alat Pertanian, Peternakan dan Perikanan		
5	Alat Rumah Tangga Perkantoran		
6	Komputer		
7	LCD		
8	Laptop		
9	Alat Komunikasi / Studio		

10	Alat Kedokteran	buah	54
11	Alat Laboratorium	buah	275
12	Bangunan Gedung	unit	67
13	Jalan Irigasi dan Jaringan	Bidang	20

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Potensi Perikanan

Budidaya Ikan di Kabupaten Kediri semakin berkembang, hal ini dapat dilihat dengan adanya usaha budidaya ikan di karamba, budidaya di mina padi, budidaya Usaha Pembenihan Ikan Rakyat (UPR). Pengembangan produksi benih ikan konsumsi dan produksi ikan konsumsi serta produksi ikan hias di Kabupaten Kediri dikelola berdasarkan jenis ikan yang terdapat pada Balai Benih Ikan dan Usaha Pembenihan Ikan Rakyat. Di Kabupaten Kediri, UPR merupakan kegiatan atau usaha yang sangat potensial, sehingga produksi benihnya merupakan penyangga utama dalam memenuhi kebutuhan benih ikan air tawar di Jawa Timur. Faktor terpenting dalam usaha pembenihan ikan adalah kualitas induk, sehingga dapat menghasilkan benih yang berkualitas sesuai standar nasional.

Adapun tabel produksi benih ikan konsumsi budidaya BBI dan UPR yang menunjang pengembangan produksi tersebut adalah sebagai berikut :

PRODUKSI BENIH IKAN KONSUMSI

NO.	JENIS	PRODUKSI BENIH IKAN (x 1000 ekor)		
		BBI	UPR	JUMLAH
1	Tombro	176,0	1.921.468	**1.921.644**
2	Tawes	160,0	2.401.869	**2.402.029**
3	Nila	190,0	3.265.974	**3.266.164**
4	Lele	170,0	8.446.661	**8.446.831**
5	Gurami	14,9	95.644	**95.659**
	JUMLAH	**710,9**	**16.131.616**	**16.132.327**

Produksi ikan konsumsi sebagian besar diserap sendiri di wilayah Kabupaten Kediri dalam rangka pemenuhan gizi dan tingkat konsumsi ikan. Benih ikan banyak dikirim keluar daerah meliputi daerah : Lamongan, Gresik, Sidoarjo,

Banyuwangi, Magelang, Boyolali, dan Indramayu yang ditebar di kolam dan sawah tambak.

Produksi ikan di Kabupaten Kediri dari Budidaya Perairan Umum di produksi 156.362/ kg dengan RTP 302/ orang, Usaha Pembenihan Ikan Rakyat (UPR) di produksi 16.132.327 dengan RTP 2392/ orang, sedangkan budidaya dari kolam di produksi 14.857.650 dengan RTP 4.585/ orang.

PRODUKSI IKAN HIAS TAHUN 2015

No	Jenis Ikan	Jumlah (x 1000 Ek)	Harga Satuan (Rp)	Nilai (x Rp 1000)
1	Akara	1.724,500	1.000	1.724.500
2	Diskus	689,600	3.000	2.068.800
3	Gapi	8.579,200	400	3.431.680
4	Cupang	79.445,500	450	35.750.475
5	Koi	54.669,000	4.000	218.676.000
6	Kar Tetra	3.758,200	400	1.503.280
7	Louhan	85,100	20.000	1.702.000
8	Manvis	5.288,400	600	3.173.040
9	Moli	5.653,100	250	1.413.275
10	Mas Koki	3.978,500	450	1.790.325
11	Oskar	847,470	1.200	1.016.964
12	Plati	24.435,000	250	6.108.750
13	Komet	63.703,600	400	25.481.440
14	Lele blorok	2.574,200	250	643.550
Jumlah		**255.431,370**		**304.484.079**

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa ikan cupang lebih tinggi jumlahnya dan merupakan produk unggulan ikan hias kabupaten kediri. Di beberapa wilayah kabupaten kediri budidaya cupang di kolam pekarangan sangat potensial untuk pengembangan ikan hias.

b. Indikator Kinerja Utama

Tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan dan UPTD Perikanan berdasarkan Renstra periode sebelumnya (2010-2015), menurut indikator kinerja utama sebagaimana Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Kediri

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Produksi Perikanan (ton)																		
	- Kolam	-	-	5.065	6.556	8.967	12.425	15.712	14.002	6.662,20	8.882,50	11.352,50	13.903,92	14.857,60	1,02	0,99	0,91	0,88	1,06
	- Perairan Umum	-	-	142,48	144,19	145,92	147,68	149,45	156,5	161	165,5	162,8	154,22	156,4	1,12	1,13	1,10	1,03	1,00
2.	Persentase Pemenuhan Konsumsi Ikan																		
	(Kg/kapita/tahun)	-	-	14,18	15,03	16,23	17,36	18,05	19,13	15,34	16,32	17,36	18,24	18,6	1,02	1,01	1,00	1,01	0,97

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Kediri

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata – rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.BELANJA TIDAK LANGSUNG	**4.005.016.500**	**4.358.336.300**	**4.500.496.000**	**4.859.857.200**	**5.730.745.700**	**3.879.654.399**	**4.092.430.568**	**4.149.360.298**	**4.533.814.435**	**5.153.524.187**	0,97	0,94	0,92	0,93	0,90	0,29	0,27
2.BELANJA LANGSUNG	**2.038.215.800**	**3.824.660.670**	**4.963.782.445**	**5.466.674.588**	**5.035.336.313**	**2.030.405.502**	**3.613.792.045**	**4.231.997.987**	**5.108.516.007**	**4.897.748.910**	**1,00**	**0,94**	**0,85**	**0,93**	**0,97**	**0,49**	**0,48**
-Belanja Pegawai	198.195.000	322.718.000	437.938.000	343.688.000	10.556.000	197.235.000	311.910.000	435.998.000	342.368.000	12.431.000	1,00	0,97	1,00	1,00	1,18	0,01	0,01
-Belanja Barang dan Jasa	1.801.470.800	2.138.163.670	2.498.056.180	3.895.290.070	3.754.692.550	1.794.695.502	2.044.071.180	2.455.908.157	3.791.385.432	3.653.521.560	1,00	0,96	0,98	0,97	0,97	0,42	0,41
-Belanja Modal	38.550.000	1.363.779.000	2.027.788.265	1.227.696.518	1.270.087.763	38.475.000	1.257.810.865	1.340.091.830	974.762.575	1.231.796.350	1,00	0,92	0,66	0,79	0,97	6,59	6,40
3.PENDAPATAN ASLI DAERAH	**127.086.350**	**163.075.825**	**193.838.250**	**203.225.525**	**430.931.000**	**137.308.125**	**170.450.325**	**213.681.350**	**224.805.725**	**550.923.318**	**1,08**	**1,05**	**1,10**	**1,11**	**1,28**	**0,68**	**0,80**
Retribusi Daerah	127.086.350	163.075.825	193.838.250	203.225.525	216.594.360	137.308.125	170.450.325	213.681.350	224.805.725	239.815.600	1,08	1,05	1,10	1,11	1,11	0,34	0,35
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		-	-	-	214.336.640	-	-	-	-	311.107.718	-	-	-	-	1,45		

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, untuk masing- masing indikator kinerja pelayanan Dinas Perikanan untuk bidang perikanan dapat di jelaskan sebagai berikut :

1) Produksi Hasil Perikanan pada indikator kinerja no.1 pada tabel diatas merupakan indikator utama, dimana untuk mencapai kinerja produksi hasil perikanan ditunjangn oleh indikator-indikator yang lain. Produksi perikanan dari tahun ke tahun menunjukkan hasil peningkatan yang cukup tinggi, dilihat dari setiap tahunnya peningkatan sangat tinggi dari target yang di tetapkan. Misalnya pada tahun 2015 produksi perikanan kolam meningkat sampai dengan 106% (rasio 1,06) hal ini menunjukkan geliat masyarakat Kabupaten Kediri dalam bidang perikanan sangatlah baik, begitu juga dengan produksi perikanan di perairan umum.
2) Kinerja persentase pemenuhan konsumsi ikan sebagaimana indikator no,4 pada tabel diatas menunjukkan peningkatan yang yang signifikan dari tahun ketahunnya, karena pengetahuan masyarakat atas protein ikan mempunyai protein yang sangat baik untuk tumbuh kembang generasi Kabupaten Kediri walaupun masih jauh dari angka tingkat konsumsi nasional.

Berdasarkan tabel 2.2 tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Komponen terbesar belanja Daerah adalah Belanja Langsung dibandingkan belanja tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja lebih mengarah pada kegiatan-kegiatan yang dapat diukur kinerjanya. Belanja pegawai menunjukkan proposi yang lebih kecil dibandingkan belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal, hal ini akan mendorong bergeraknya sektor riil di masyarakat sebagai penyedia barang/jasa.
2) Realisasi anggaran menunjukkan prestasi yang baik dengan rasio capaian berkisar 94%. Dapat dipastikan bahwa semua kegiatan mencapai target yang diharapkan. Varian antara anggaran dengan realisasi lebih disebabkan adanya efisiensi pengadaan barang/jasa.
3) Dinas Perikanan merupakan salah satu SKPD penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Target PAD mengalami peningkatan berkisar 34 % pertahun tetapi dengan adanya tambahan lain lain pendapatan asli daerah pada tahun 2015 maka pertumbuhan PAD meningkat menjadi 68% pertahun dengan peningkatan 80%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi PAD masih dapat ditingkatkan dengan cara memperbesar kapasitas sarana prasarana dan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan PD

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang dalam Pembangunan Perikanan di Kabupaten Kediri guna menghasilkan strategi, dengan uraian sebagai berikut :

a. Tantangan meliputi :

- Peningkatan kualitas SDM Perikanan yang belum merata
- Keterbatasan kualitas SDM perikananyang belum merata
- Tuntutan penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan

b. Peluang meliputi :

- Dukungan Pemerintah pada sub sektor perikanan semakin besar;
- Teknologi dan inovasi perikanan yang semakin berkembang;
- Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil perikanan semakin tinggi;
- Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang perikanan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan kondisi lapang maka Dinas Perikanan melakukan analisis isu-isu strategis terkait bidang perikanan antara lain :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan PD

Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kediri pada periode sebelumnya, visi dan misi Bupati Kediri yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2016-2021, dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2020, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya permodalan dibidang usaha perikanan sehingga produksi dan produktifitas yang diharapkan masih belum optimal.
2. Perlu peningkatan mutu benih ikan yang beredar di masyarakat sehinggga dapat meningkatkan produksi ikan.
3. Optimalisasi UPTD Sentra Aquabis Perikanan (SAP) dan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) untuk menunjang peningkatan mutu benih dan pemasarannya

a. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Adapun kondisi Lingkungan yang Strategis yang berpengaruh dikelompokkan dalam dua faktor yakni Faktor Lingkungan Eksternal dan Faktor Lingkungan Internal, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal
   a. Kekuatan (Streng)
      - Adanya sumberdaya alam yang mendukung dibidang Perikanan
      - Tersedianya tenaga teknis dibidang Perikanan
      - Tersedianya anggaran dibidang Perikanan
      - Tersedianya produk-produk hukum yang mendukung Dinas Perikanan
   b. Kelemahan(Weakness)
      - Terbatasnya sumberdaya manusia dibidang Perikanan
      - Belum optimalnya produktifitas dibidang Perikanan
      - Kurangnya sarana dan prasarana dibidang Perikanan

- Belum optimalnya fungsi-fungsi potensial Dinas Perikanan (SAP, BBI, Pasar Ikan Gampengrejo, Depo Ikan Hias Pranggang)
- Kurangnya koordinasi teknis dibidang Perikanan

2. Lingkungan Eksternal
   a. Peluang (Opportunities)
      - Adanya kemajuan tehnologi dibidang Perikanan
      - Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber potensi hewani dalam hal ini ikan
      - Adanya pelatihan-pelatihan diklat tehnis dibidang Perikanan
      - Adanya dukungan yang tinggi dan masyarakat terhadap bidang Perikanan
      - Adanya peluang eksport yang tinggi produk-produk Perikanan
   b. Ancaman (Treath)
      - Perubahan iklim global menyebabkan wabah penyakit-penyakit ikan
      - Tingginya harga pakan yang berimbas terhadap tingginya ongkos produksi budidaya
      - Menurunnya kualitas mutu benih dan induk ikan yang beredar di masyarakat

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kediri Tahun 2016 - 2021 ***"Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional".*** Untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Kediri ini dijabarkan dalam 15 Misi antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
2. Mempercepat Pembangunan di sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan untuk memperkuat Kemandirian Menuju Swasembada Pangan
3. Peningkatan Kesejahteraan Lahir Batin di Masyarakat
4. Pendidikan Berkualitas dengan Biaya Murah (Terjangkau)
5. Masyarakat Mandiri dan Berkeadilan di bidang Kesehatan
6. Mengembangkan Kreatifitas, Produktifitas dan Pendapatan Masyarakat Melalui Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

7. Mengembangkan Industri Pariwisata untuk mendorong kreatifitas dan produktifitas masyarakat memajukan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah
8. Pengembangan Koperasi
9. Mempermudah Perizinan sebagai Pendorong Investasi dan Dunia Usaha
10. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Tertata, Taat Hukum, tertib Berbasis Kependudukan
11. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional
12. Pembangunan Infrastuktur Penunjang Percepatan Pembangunan
13. Mengembangkan Jaringan Komonikasi dan Informasi
14. Pengembangan Lingkungan Hidup yang Seimbang dan Sehat
15. Pembangunan Sektor Ketenagakerjaan

Dari 15 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih maka Dinas Perikanan berkewajiban mewujudkan **Misi 2** yaitu : *“ Mempercepat Pembangunan di sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan untuk memperkuat Kemandirian Menuju Swasembada Pangan”.*

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri terhadap Visi, Misi dan
Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi : Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional				
NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 2 : Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan			
1. 2. 3.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	- Masih banyak penyakit-penyakit ikan yang masih perlu penanganan - Minimnya SDM petugas perikanan	-Masih rendahnya akses pembudidaya ikan terhadap permodalan -tingginya harga pakan ikan karena bahan bakunya masih import -Masih rendahnya SDM peternak ikan	-Pelaku perikanan di Kabupaten Kediri sangat berkembang pesat

3.3 Telaah Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

a. Visi

Pembangunan Jawa Timur 2014-2019 mempunyai landasan visi: ***"Jawa Timur Lebih Sejahtera Berakhlak Berkeadilan Mandiri dan Berdaya Saing"***

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 tersebut maka misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 adalah : ***" Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik"***

c. Arah Kebijakan

Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 menindaklanjuti ***misi ke-2 yaitu Meningkatnya pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi dan misi ke-3 yaitu Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang,*** maka dari itu strategi dan arah kebujakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah:

- Strategi
    a. Peningkatan SDM Perikanan dan Kelautan
    b. Penerapan teknologi perikanan dan kelautan
    c. Fasilitasi sarana prasarana budidaya, penangkapan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Kebijakan
    a. Peningkatan kapasitas masyarakat perikanan dan kelautan
    b. Pengembangan Perikanan Budidaya
    c. Pengembangan Perikanan Tangkap
    d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
    e. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
    f. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pengawasan
    g. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Berdasarkan telaah terhadap Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur tahun 2014 -2019, permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri beserta faktor penghambat dan pendorong Keberhasilan perikanan sebagai berikut :

a.Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri :

- Rendahnya produktivitas ikan
- Kurangnya ketersediaan infrastuktur, sarana prasarana perikanan
- Sistim pembenihan dan perbibitan perikanan belum berjalan optimal
- Keterbatasan akses pembudidaya ikan terhadap permodalan
- Kurang optimalnya kinerja pelayanan birokrasi perikanan
- Keterbatasan SDM bidang perikanan

b.Faktor Penghambat permasalahan diatas antara lain :

- Ketersediaan Sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam peningkatan produksi, populasi ikan
- Keterbatasan anggaran

c.Faktor Pendorong

- Potensi perikanan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri yang semakin meningkat
- Gairah masyarakat pada perikanan semakin tinggi

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasakan telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri tahun 2010 – 2030, maka pelayanan yang terkait sesuai tugas dan fungsi Dinas Perikanan terdapat pada Bagian ketiga RTRW yaitu kawasan budidya yang terdiri atas kawasan peruntukan pertanian dan kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan Budidaya Perikanan meliputi :

a. Kawasan peruntukan perikanan meliputi perikanan air tawar untuk konsumsi dan ikan hias
b. Kawasan peruntukan perikanan berada di kecamatan Pare, Plosoklaten, Kandangan, Kras, dan Kecamatan Ngadiluwih

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari RTRW

Faktor penghambat :

- Alih fungsi lahan pertanian di daerah kawasan budidaya
- Adanya potensi bencana yang memberikan ancaman terkait produksi perikanan
- Belum optimalnya kawasan strategis di Kabupaten Kediri

Secara umum faktor penghambat utama ditinjau dari implikasi RTRW adalah perubahan kondisi lahan pertanian produktif seiring dengan pertumbuhan penduduk

yang memerlukan permukiman, serta berkembangnya perekonomian dan industri. Hal ini akan memberikan hambatan yang signifikan dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi bahan pangan.

Faktor pendorong :

- Penetapan kawasan berdasarkan agropolitan memberikan arahan pengembangan komoditas perikanan sesuai perwilayahan dan pusat kegiatan.
- Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan,
- Infrastruktur di kabupaten kediri dalam kondisi optimal.

Penetapan Kawasan agropolitan memberikan arahan yang jelas terhadap pengembangan perikanan. Hal ini akan berimplikasi pada peningkatan keanekaragaman konsumsi masyarakat .

Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya ditujukan untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan. Strateginya adalah : mempertahankan dan mengembangkan budidaya perikanan dengan berpedoman pada KLHS.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi KLHS

Faktor penghambat :

- Konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian,
- Perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan terhadap keseimbangan alam dan memunculkan potensi terjadinya bencana,
- Belum optimalnya keterpaduan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Sebagian besar lahan sawah yang terkonversi pada mulanya beririgasi teknis / semi teknis dengan produktivitas tinggi. Konversi juga mengakibatkan degradasi kualitas irigasi lahan sawah di sekitarnya. Di samping itu juga mempengaruhi ekosistem secara makro dan mempengaruhi berbagai gangguan terhadap budidaya pangan. Hal ini membawa potensi ancaman terhadap pasokan pangan.

Perubahan teknologi yang mengandalkan bahan kimia akan menurunkan daya dukung dan kualitas lahan bagi produksi pangan. Sedangkan keterpaduan antara kawasan perkotaan dan perdesaan dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di perdesaan.

Faktor pendorong :

- Adanya kebijakan strategis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- Adanya berbagai gerakan untuk memperbaiki lingkungan
- Peningkatan penerapan teknologi pertanian organik,

- Peningkatan konservasi sumber air.

Kebijakan strategis akan memberikan perlindungan terhadap lingkungan produksi pangan seiring dengan berbagai gerakan memperbaiki lingkungan dan konservasi sumber air. Peningkatan penerapan pertanian organik akan membawa dampak peningkatan kualitas lahan, mutu dan keamanan produk bahan pangan dan menstimulasi masyarakat untuk meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan terutama dalam konsumsi ikan yang merupakan salah satu protein hewani yang baik untuk mencerdaskan anak bangsa.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten kediri sebagai berikut :

1. Banyaknya konversi lahan produktif maupun tidak produktif menjadi areal pemukiman, dipastikan akan merusak lingkungan dan menyebabkan produktivitas ikan serta sarana pendukung lainnya akan mengganggu ketersediaannya.
2. Potensi perikanan di Kabupaten Kediri, dapat memberi peluang untuk dikembangkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani.
3. Rendahnya konsumsi terhadap hasil perikanan masyarakat, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi kegiatan *Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.*
4. Masih tingginya harga pakan ikan yang disebabkan karena bahan bakunya masih import
5. Kurangnya kualitas dan kuantitas benih dan induk ikan, sehingga produktivitasnya belum maksimal.
6. Masih banyak wabah penyakit-penyakit ikan yang perlu mendapat penanganan secara berkelanjutan
7. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perikanan baik petugas maupun pembudidaya ikan.
8. Kurangnya modal masyarakat sehingga perikanan merupakan usaha sampingan dalam menambah pendapatan masyarakat dan teknologi yang diterapkan masih relatif sederhana dan belum menyeluruh yang dilakukan secara tradisional.
9. Masih rendahnya aksesibilitas pembudidaya ikan terhadap permodalan.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kabupaten secara umum, sehingga terdapat keselarasan antara tujuan dan sasaran serta indikator Perangkat Daerah.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 menjadi dasar pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 dijelaskan sebagaimana tercantum dalam lampiran buku ini

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Kediri sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Kediri

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Meningkatkan produksi perikanan	1.Meningkatnya produksi perikanan	1.Jumlah Produksi perikanan					
			-kolam (ton)	15.595	17.468	20.273	21.386	22.350
			-perairan umum (ton)	170,747	179,284	186,456	195,778	203,610
			-ikan hias (ribu ekor)	278.931	292.878	307.521	319.822	335.813
			-benih ikan (juta ekor)	17.616,501	18.321,161	19.237,219	20.006,707	20.806,976
			2.Jumlah Pembudidaya ikan	8.478	8.690	8.907	9.085	9270
		2.Meningkatnya konsumsi asal ikan	1.Jumlah konsumsi asal ikan (kg/kapita/tahun)	19,90	20,30	20,71	21,12	21,54
			2. Nilai tambah produk perikanan	1.356.689.110	1.383.822.892	1.411.499.350	1.439.729.337	1.468.523.924

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dalam 5 tahun mendatang. Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Dinas Perikanan adalah strategi dan kebijakan Dinas Perikanan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan menunjukkan bagaimana cara Dinas Perikanan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Perikanan, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Perikanan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Perikanan bagi setiap program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perikanan.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang profesional			
MISI 2 : Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
Meningkatkan produksi perikanan.	Meningkatnya produksi perikanan	Meningkatkan skala usaha perikanan yang berorientasi agribisnis dan agroindustri Mengembangkan dan meningkatkan kualitas perikanan serta kesehatan ikan meliputi komoditas, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana Meningkatkan Sumber daya manusia pembudidaya ikan	Menjalin kerjasama dengan pihak perbankan/investor agar berperan dalam pembangunan perikanan Pemantauan kesehatan ikan meliputi komoditas , SDM serta sarana dan Prasaranan ,Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam membudidayakan ikan
	Meningkatnya konsumsi asal ikan.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan Meningkatnya nilai tambah produk l perikanan	Pengembangan sistem Penyuluhan tentang konsumsi ikan Promosi produk –produk perikanan Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil ikan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini dikemukanan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program Dinas Perikanan merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Kediri.

Program pembangunan perikanan di RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan Kabupaten kediri terdiri dari 3 program, yaitu :

1. Program Pengembangn Budidaya perikanan
2. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan perikanan
3. Program optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi Perikanan

5.1 Program dan Kegiatan

Adapun program yang akan dicapai Sesuai Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 termasuk program rutin perkantoran sebagai pendukung program pembangunan diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Pengembangan Budidaya Perikanan
5. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
6. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Tahun Anggaran 2016-2021 adalah :

Program : Pelayanan Adm. Perkantoran
Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan : Penyediaan jasa alat Tulis kantor
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan penggandan
Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
Kegiatan : Penyediaan Peralatan rumah Tangga
Kegiatan : Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Kegiatan: Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknik Perkantoran
Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kegiatan : Penyediaan jasa Operasional Kantor
Kegiatan : Penyediaan Administrasi Barang
Kegiatan : Penyediaan jasa Keamanan Kantor

Program : Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LKPJ)
Kegiatan : Penyusunan LkjIP (LAKIP)
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja (Renja)
Kegiatan : Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kegiatan : Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Program : Pengembangan Budidaya Perikanan
Kegiatan : Pendampingan pada kelompok Tani Pembudidaya Ikan
Kegiatan : Pengembangan Pembenihan Ikan
Kegiatan : Pengembangan Ikan di Kolam Rakyat
Kegiatan : Intensifikasi Budidaya Ikan Hias
Kegiatan : Pendampingan Sertifikasi Tanah Untuk Pembudidaya Ikan

Program : Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Kegiatan : Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
Kegiatan : Pembinaan Tehnis Perikanan

Program :	**Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**
Kegiatan :	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kegiatan :	Pelestarian Sumberdaya Perairan Umum
Kegiatan :	Peningkatan sarana & prasarana perikanan
Kegiatan :	Optimalisasi Sentra Aquabis Perikanan (SAP)
Kegiatan :	Pengembangan Pasar Benih Ikan
Kegiatan :	Pameran dan Kontes Ikan
Kegiatan :	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan
Kegiatan :	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perikanan Kabupaten Kediri

Program/Kegiatan	Indikator Program (outcome)/Kegiatan (output)	Data Kinerja Pada Awal Perencanaan	Rencana Kerja									
			2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan layanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**557.234.600**	**100%**	**495.000.000**	**100%**	**481.000.000**	**100%**	**512.590.331**	**100%**	**485.000.000**
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu yang disediakan untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 BULAN	12 BULAN	60.400.600	12 BULAN	61.000.000	12 BULAN	61.000.000	12 BULAN	61.000.000	12 BULAN	61.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penerima jasa administrasi keuangan	8 ORANG	6 ORANG	84.834.000	6 ORANG	75.000.000	6 ORANG	75.000.000	6 ORANG	75.000.000	6 ORANG	75.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	2 ORANG	2 ORANG	42.100.000	2 ORANG	42.100.000	2 ORANG	42.100.000	2 ORANG	42.100.000	2 ORANG	42.100.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 BULAN	12 BULAN	12.000.000	12 BULAN	10.000.000	12 BULAN	10.000.000	12 BULAN	10.000.000	12 BULAN	10.000.000
Penyediaan jasa alat tulis kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	1 PAKET	1 PAKET	20.000.000	1 PAKET	20.000.000	1 PAKET	20.000.000	1 PAKET	26.590.331	1 PAKET	20.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 BULAN	12 BULAN	12.000.000	12 BULAN	10.000.000	12 BULAN	10.000.000	12 BULAN	15.000.000	12 BULAN	10.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 BULAN	12 BULAN	5.000.000	12 BULAN	5.000.000	12 BULAN	5.000.000	12 BULAN	5.000.000	12 BULAN	5.000.000
Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Waktu penyediaan perlengkapan kantor	12 BULAN	12 BULAN	-	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	2.000.000	12 BULAN	12.000.000	12 BULAN	6.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	Waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12 BULAN	12 BULAN	9.000.000	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.000.000	12 BULAN	6.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan (Jawa Pos dan Trubus) dan peraturan perundang-undangan	12 BULAN	12 BULAN	5.000.000	12 BULAN	5.000.000	12 BULAN	5.000.000	12 BULAN	5.000.000	12 BULAN	5.000.000
Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	12 BULAN	12 BULAN	12.000.000	12 BULAN	10.000.000	12 BULAN	10.000.000	12 BULAN	10.000.000	12 BULAN	10.000.000
Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Waktu penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 BULAN	12 BULAN	70.000.000	12 BULAN	40.000.000	12 BULAN	35.000.000	12 BULAN	40.000.000	12 BULAN	35.000.000
Program/Kegiatan	**Indikator Program (outcome)/Kegiatan (output)**	**Data Kinerja Pada Awal**	**Rencana Kerja**									

		Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/ Teknik Perkantoran	Jumlah penerima honor tenaga arsiparis	1 ORANG	1 ORANG	1.900.000	1 ORANG	1.900.000	1 ORANG	1.900.000	1 ORANG	1.900.000	1 ORANG	1.900.000
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Waktu penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 BUALN	12 BULAN	50.000.000	12 BULAN	30.000.000	12 BULAN	25.000.000	12 BULAN	30.000.000	12 BULAN	25.000.000
Penyediaan Jasa Operasional kantor	Jumlah penerima honorarium tenaga Operasional kantor, PPID dan pengelola website	3 ORANG	15 ORANG	79.400.000	15 ORANG	79.400.000	15 ORANG	79.400.000	15 ORANG	79.400.000	15 ORANG	79.400.000
Penyediaan jasa administrasi barang	Jumlah penerima honorarium pengurus dan penyimpan barang	2 ORANG	2 ORANG	8.500.000	2 ORANG	8.500.000	2 ORANG	8.500.000	2 ORANG	8.500.000	2 ORANG	8.500.000
Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah peneriman honorarium tenaga keamanan kantor di Dinas Perikanan dan UPTD Perikanan	12 ORANG	2 ORANG	85.100.000	2 ORANG	85.100.000	2 ORANG	85.100.000	2 ORANG	85.100.000	2 ORANG	85.100.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**100%**	**70.000.000**	**100 %**	**72.000.000**	**100 %**	**72.000.000**	**100 %**	**72.000.000**	**100 %**	**64.000.000**
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Waktu penyediaan secara rutin / berkala gedung kantor Dinas Perikanan dan UPTD Perikanan	12 BULAN	12 BULAN	20.000.000	12 BULAN	16.000.000	12 BULAN	16.000.000	12 BULAN	16.000.000	12 BULAN	16.000.000
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Waktu penyediaan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	12 BULAN	12 BULAN	40.000.000	12 BULAN	40.000.000	12 BULAN	40.000.000	12 BULAN	40.000.000	12 BULAN	40.000.000
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Waktu penyediaan secara rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 BULAN	12 BULAN	10.000.000	12 BULAN	8.000.000	12 BULAN	8.000.000	12 BULAN	8.000.000	12 BULAN	8.000.000
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Waktu penyediaan secara rutin / berkala peralatan gedung kantor	12 BULAN	12 BULAN	-	12 BULAN	8.000.000	12 BULAN	8.000.000	12 BULAN	8.000.000	12 BULAN	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan**	**100%**	**100%**	**23.500.000**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**27.500.000**
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ dan dokumen LPPD	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	6.500.000	2 DOKUMEN	5.000.000	2 DOKUMEN	5.000.000	2 DOKUMEN	5.000.000	2 DOKUMEN	5.000.000
Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen LAKIP dan Perjanjian Kinerja	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	7.000.000	2 DOKUMEN	5.000.000	2 DOKUMEN	5.000.000	2 DOKUMEN	5.000.000	2 DOKUMEN	5.000.000
Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	Jumlah dokumen RENJA dan dokumen RENJA Perubahan	2 DOKUMEN	2 DOKUMEN	5.000.000	2 DOKUMEN	5.000.000	2 DOKUMEN	5.000.000	2 DOKUMEN	5.000.000	2 DOKUMEN	5.000.000

Program/Kegiatan	Indikator Program (outcome)/Kegiatan (output)	Data Kinerja Pada Awal Perencanaan	Rencana Kerja				
			2017	2018	2019	2020	2021

			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masarakat (IKM)	Jumlah Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penyuluhan	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	5.000.000	1 DOKUMEN	5.000.000	1 DOKUMEN	5.000.000	1 DOKUMEN	5.000.000	1 DOKUMEN	5.000.000
Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah dokumen RENSTRA Dinas Perikanan tahun 2022-2026	1 DOKUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	1 DOKUMEN	7.500.000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	**Produksi perikanan**			**1.240.000.000**		**1.280.020.000**		**1.202.610.000**		**1.404.980.000**		**1.172.610.000**
	- kolam (ton)	**14.857,60**	**15.595**		**17.468**		**20.273**		**21.386**		**22.350**	
	-perairan umum (ton)	**156,4**	**170,747**		**179,284**		**186,456**		**195,778**		**203,61**	
	- ikan hias (ribu ekor)	**255.431**	**278.931**		**292.878**		**307.521**		**319.822**		**335.813**	
	-Benih ikan (juta ekor)	**16.132,33**	**17.616,50**		**18.321,16**		**19.237,22**		**20.006,71**		**20.806,98**	
Kegiatan Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan	Output : Jumlah Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan	10 paket	8 paket	90.000.000	8 paket	151.700.000	8 paket	92.610.000	8 paket	196.880.000	8 paket	62.610.000
	Jumlah induk ikan lele yang tersedia	20 ekor	20 ekor		20 ekor		20 ekor		20 ekor		20 ekor	
Kegiatan Intensifikasi Budidaya Ikan Hias	Output; Jumlah tersedianya induk ikan hias yang berkwalitas	1 paket	2 paket	50.000.000	2 paket	58.320.000	2 paket	50.000.000	2 paket	68.100.000	2 paket	50.000.000
Kegiatan Pengembangan Pembenihan Ikan	Output: Jumlah tersedianya Pengembangan Pembenihan Ikan	1 paket	1 paket	525.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	525.000.000	1 paket	500.000.000
Kegiatan Pengembangan budidaya Ikan di Kolam Rakyat	Output : Tersedianya Pengembangan budidaya Ikan di Kolam Rakyat	1 paket	1 paket	515.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	515.000.000	1 paket	500.000.000
Kegiatan Sertifikasi Tanah untuk Pembudidaya Ikan	Output: Jumlah Tanah pembudidaya ikan yang telah bersertifikasi	100 bidang	100 bidang	60.000.000	100 bidang	70.000.000	100 bidang	60.000.000	100 bidang	100.000.000	100 bidang	60.000.000

Program/Kegiatan	**Indikator Program (outcome)/Kegiatan (output)**	**Data Kinerja Pada Awal Perencanaan**	**Rencana Kerja**				
			2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**

			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Program **Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan**	**Meningkatnya konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)**	**18,6**	**19,9**	**195.000.000**	**20,3**	**227.462.000**	**20,71**	**187.605.000**	**21,12**	**326.455.000**	**21,54**	**169.605.000**
Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan	Output: Jumlah sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan	1 kali	1 kali	90.000.000	1 kali	104.990.000	1 kali	82.605.000	1 kali	183.600.000	1 kali	72.605.000
Kegiatan Pembinaan Teknis Perikanan	Output: Waktu yang digunakan untuk Pembinaan Teknis Perikanan	12 bulan	12 bulan	105.000.000	12 bulan	122.472.000	12 bulan	105.000.000	12 bulan	142.855.000	12 bulan	97.000.000
Program **Optimalisassi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**	**Jumlah pelaku UMKM Hasil Ikan**	**-**	**119**	**4.485.600.000**	**125**	**4.305.518.000**	**131**	**4.336.785.000**	**138**	**4.663.974.669**	**145**	**4.281.285.000**
Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Output : Jumlah sarana produksi perikanan yang tersedia	-pakan ikan= 2.500 kg -obat-obatan ikan= 1 paket -pupuk organik=500kg Pupuk anorganik=200kg	-pakan ikan= 2.500 kg -obat-obatan ikan= 1 paket -pupuk organik=500kg Pupuk anorganik=200kg	30.000.000	-pakan ikan= 2.500 kg -obat-obatan ikan= 1 paket -pupuk organik=500kg Pupuk anorganik=200kg	31.992.000	-pakan ikan= 2.500 kg -obat-obatan ikan= 1 paket -pupuk organik=500kg Pupuk anorganik=200kg	30.000.000	-pakan ikan= 2.500 kg -obat-obatan ikan= 1 paket -pupuk organik=500kg Pupuk anorganik=200kg	40.814.669	-pakan ikan= 2.500 kg -obat-obatan ikan= 1 paket -pupuk organik=500kg Pupuk anorganik=200kg	30.000.000
Kegiatan Pengembangan Pasar Benih Ikan	Output : Jumlah unit Pengembangan Pasar Benih Ikan	-	1 unit	1.035.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.035.000.000	1 unit	1.000.000.000
Kagiatan Pelestarian Sumberdaya Perairan Umum	Output : Jumlah Pelestarian Sumberdaya Perairan Umum	2 lokasi	2 lokasi	40.000.000	2 lokasi	39.882.000	2 lokasi	30.000.000	2 lokasi	54.420.000	2 lokasi	20.000.000
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Output: Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	1 paket	1 paket	1.060.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.060.000.000	1 paket	1.000.000.000

Program/Kegiatan	**Indikator Program (outcome)/Kegiatan (output)**	**Data Kinerja Pada Awal Perencanaan**	**Rencana Kerja**									
			2017		**2018**		**2019**		**2020**		**2021**	
			Target	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**	**Target**	**Rp**

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Kegiatan **Optimalisasi Sentra Aquabis Perikanan (SAP)**	**Output:** **Jumlah Pendukung pelayanan SAP**	**1 paket**	**1 paket**	**30.000.000**	**1 paket**	**26.664.000**	**1 paket**	**29.600.000**	**1 paket**	**68.331.000**	**1 paket**	**27.600.000**
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih IKan	Output: Jumlah unit Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih IKan	-	1 unit	1.040.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.060.000.000	1 unit	1.000.000.000
Kegiatan Pameran dan Kontes Ikan	Output: Jumlah pameran dan kontes ternak ikan nyang dilaksanakan	1 kali	1 kali	200.600.000	1 kali	206.980.000	1 kali	247.185.000	1 kali	272.920.000	1 kali	203.685.000
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 paket	1 paket	1.050.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.050.000.000	1 paket	1.000.000.000
TOTAL			**6.571.334.600**		**6.400.000.000**		**6.300.000.000**		**7.000.000.000**		**6.200.000.000**	

5.2 Program Lintas SKPD

Program Lintas SKPD adalah program strategis SKPD yang mempunyai cakupan luas dan melibatkan lebih dari satu SKPD yang dinilai memiliki pengaruh strategis terhdap pencapaian tujuan, sasaran dan misi-misi pembangunan.

Pada Program Lintas SKPD perlu ditetapkan kedudukan dan fungsi dari masing-masing SKPD beserta mekanisme tata kerja untuk menjamin koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dalam mencapai hasil-hasil yang ditetapkan.

Program Lintas SKPD yang ada pada Dinas Perikanan antara lain:

- Dana Bergulir Modal Kerja Usaha Perikanan
  - Dinas Perikanan sebagai Pelaksana Teknis
  - DPPKAD sebagai Pelaksana DPA
  - Bank Daerah sebagai Penyimpan dana

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perikanan Kabupaten Kediri dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2021 terkait dengan sub sektor perikanan adalah " Meningkatnya produksi perikanan"

Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021)
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produksi Perikanan								
-kolam (ton)	14.857,60	14.978	15.595	17.468	20.273	21.386	22.350	22.350
-perairan umum (ton)	156,4	164.180	170,747	179,284	186,456	195,778	203,610	203,610
-ikan hias (ribu ekor)	255.431	268.203	278.931	292.878	307.521	319.822	335.813	335.813
-benih ikan (juta ekor)	16.132,33	16.938,943	17.616,501	18.321,161	19.237,219	20.006,707	20.806,976	20.806,976

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Thun 2016-2021 yang memuat visi,misi tujuan,strategi, kebujakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun mendatang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kediri

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan

BUPATI KEDIRI

HARYANTI SUTRISNO

RANCANGAN RENSTRA

2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jl. Pamenang No. 40 Telp./Fax (0354) 681890 Kediri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……... I
DAFTAR ISI …… ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang …….. 1
1.2 Landasan Hukum …….. 2
1.3 Maksud dan Tujuan …….. 4
1.4 Sistematika Penulisan ……. 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEDIRI
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perikanan Kabupaten Kediri 6
2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Kediri …. 19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri..... 22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri .....…….. 27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri …….. 28
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …….. 29
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pertanian serta Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur …… 32
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis …… 33
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ……. 35
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Kediri 36
4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri 36
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ……... 38
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ……. 47

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2021

Visi : Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional

Indikator pada dokumen RPJMD :

Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PD Penanggungjawab
			Awal	Akhir						
Misi 2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan										
1. Terwujudnya kemandirian menuju swasembada pangan melalui peningkatan produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan	Nilai Pola Pangan Harapan	(menggunakan aplikasi)	87,9	90,4	1. Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	(Jumlah produksi ikan tahun ini – Jumlah produksi ikan tahun lalu)/Jumlah produksi ikan tahun lalu X 100%			Dinas Perikanan
						- Kolam		6,86	4,5	
						- Perairan umum		1,43	4	

Indikator pada dokumen Renstra :

Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Target		Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	PD Penanggungjawab
			Awal	Akhir						
Misi 2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan										
1. Meningkatkan produksi perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	(Jumlah produksi ikan tahun ini – Jumlah produksi ikan tahun lalu)/Jumlah produksi ikan tahun lalu X 100%			1.Meningkatnya prod.Perikanan	1. Jumlah prod. Perikanan - Kolam (ton) - Perairan umum (ton) - Ikan hias (ribu ekor) - Benih ikan (juta ekor	Jumlah Produksi ikan selama 1 tahun di 26 Kecamatan	 6,86 1,43 3,99 4	 4,5 4 4,5 4	Dinas Perikanan
						2. Jumlah Pembudidaya ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang ada di 26 kecamatan	8280	9.270	
	- Kolam		6,86	4,5	2. Meningkatnya konsumsi asal ikan	1.Jumlah konsumsi asal ikan	Jumlah ikan yang dikonsumsi penduduk (kg/kap/tshun)	19,15	21,54	
	- Perairan umum		1,43	4		2.Nilai tambah produk perikanan	Selisih nilai produk perikanan yg diolah dengan produk ikan segar (Rp)			

Catatan :

1. Tabel ini dibuat sebagai alat kerja bagi Perangkat Daerah (PD) sesuai arahan dari Biro Organisasi Prov. Jawa Timur, bahwa Sasaran pada RPJMD menjadi Tujuan pada Renstra PD.
2. Sasaran pada Renstra PD bisa berjumlah lebih dari satu dan disesuaikan dengan Pohon Kinerja yang telah dibuat.
3. Apabila isian tabel di atas belum sesuai dengan kondisi PD, diharapkan melakukan koreksi dan/atau revisi dan disampaikan pada saat pelaksanaan asistensi dengan Tim SAKIP Kabupaten Kediri.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahNya, sehingga dapat terselesaikan penyusunan Buku Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Renstra SKPD Dinas Perikanan pada prinsipnya merupakan implementasi dukungan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam waktu 5 (lima) tahun, untuk itu Renstra OPD yang berkesinambungan sesuai dengan potensi daerah sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Demikianlah Renstra-OPD Tahun 2016-2021 Dinas Perikanan yang dapat kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri pada umumnya dan sub sektor perikanan pada khususnya.

Kediri, Oktober 2016
Plt.KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

Drs. BUSRO QARIM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 195906211980031008

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PERIKANAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188.45//418.43/2016
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATENKEDIRI,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kediri berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD;
b. bahwauntuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kediri perrlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 – 2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025;
16. Keputusan Bupati Nomor.....tentang Pengesahan Renstra OPD

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal Oktober 2016

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

BUSRO QARIM

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1 Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Kediri;